

## 300 WARGA MISKIN GROBOGAN BAKAL DAPAT SAMBUNGAN LISTRIK GRATIS



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2023/12/image-20231226082333.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Grobogan – Sebanyak 300 warga Grobogan yang miskin atau kurang mampu akan mendapatkan sambungan listrik gratis dalam waktu dekat. Saat ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Selatan bersama Bappeda Grobogan masih melakukan inventarisasi dan validasi kelompok masyarakat yang belum teraliri listrik secara mandiri.

Kepala Bidang Prasarana, Wilayah dan Ekonomi (Praswilek) Bappeda Grobogan Candra Yulian Pasha mengatakan, pada tahun ini pihak Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan memiliki kuota penyambungan 900 listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu.

”Ada kuota 900 sambungan listrik gratis yang dialokasikan untuk Kabupaten Rembang, Blora dan Grobogan. Grobogan mendapat jatah 300 kuota. Mereka ini sudah menggunakan listrik, tapi nyalur sambungan ke tetangga,” katanya, Jumat (14/6/2024).

Daerah sasaran di Grobogan dalam program listrik gratis ini ada di Kecamatan Toroh dan Geyer. Candra mengatakan, pihaknya pun telah mengundang kepala desa setempat untuk pendataan tersebut.

”Kami telah mengundang sejumlah kepala desa, perangkat desa atau perwakilan dari desa pada akhir Mei lalu untuk mendata lebih jelas warganya yang belum tersambung listrik,” imbuhnya.

Candra menambahkan, perwakilan dari sejumlah desa tersebut turut membawa data sesuai by name by address untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi (verval) oleh Dinas ESDM. Meski begitu, pihaknya hingga kini belum bisa melihat datanya secara langsung.

”Sementara kami belum bisa melihat datanya secara langsung. Karena terdapat dalam aplikasi sistem kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG) di Dinsos,” ujar dia.

SIKS-NG merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi tersebut memuat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Candra mengatakan, pihak ESDM yang akan langsung melakukan verval dengan mendatangi langsung orang dengan alamat tersebut. Kemudian juga disesuaikan dengan data administrasi kependudukan.

”Jadi mereka ini masyarakat yang kurang mampu dan masuk dalam DTKS. Jadi bisa diusulkan untuk mendapatkan sambungan listrik gratis dari program ini,” tandasnya. (Saiful Anwar)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/416339/300-warga-miskin-grobogan-bakal-dapat-sambungan-listrik-gratis>, “300 Warga Miskin Grobogan Bakal Dapat Sambungan Listrik Gratis”, tanggal 14 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/kabupaten-grobogan-terima-300-kuota-sambungan-listrik-gratis/>, “Kabupaten Grobogan Terima 300 Kuota Sambungan Listrik Gratis”, tanggal 24 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*